



# Buletin Parlementaria

Nomor 980/II/X/2017 • Oktober 2017



**Fahri Hamzah**  
**Kita Harus Terus Kritis pada Negara**

**Peringatan Kesaktian Pancasila**  
**Tegaskan Komitmen Ideologi Negara**



**Untuk Menunjang  
Pengoperasian  
Blok Masela  
Komisi V Tinjau  
Infrastruktur MTB**

TIDAK  
DIPERJUAL  
BELIKAN

# Untuk Menunjang Pengoperasian Blok Masela Komisi V Tinjau Infrastruktur MTB

Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) saat ini bukan lagi menjadi konsumsi lokal daripada masyarakat MTB atau Provinsi Maluku. Tetapi saat ini MTB sudah menjadi konsumsi nasional dan internasional. Karena di MTB ini ada Blok Masela yang memiliki gas abadi.

“Untuk menunjang daripada pengoperasian Blok Masela ini, maka diperlukan infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu Komisi V DPR RI patut hadir di sini untuk melihat secara dekat pembangunan yang saat ini dibiayai oleh APBN seperti Bandara Udara Mathilda Batlayeri dan Pelabuhan Laut Saumlaki,” papar Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi V yang juga Wakil Ketua Komisi V Michael Wattimena di sela-sela kunjungan di Saumlaki, beberapa hari lalu.

Sebagaimana diketahui, saat ini jika Blok Masela mulai beroperasi, maka semua kegiatan itu akan melibatkan ribuan tenaga kerja yang akan melalui Bandara Udara Mathilda Batlayeri dan juga Pelabuhan Laut Saumlaki yang berada di MTB.

“Dari sisi pengembangan infrastruktur, baik itu bandara maupun pelabuhan laut harus mendapat perhatian dalam rangka pengoperasian Blok Masela tersebut.

Karena tenaga kerja yang dibutuhkan Blok Masela bukan ratusan tetapi sampai puluhan ribu orang yang akan terjadi. Dan itu semua aktivitasnya melalui obyek kegiatan infrastruktur bandara dan pelabuhan laut,” jelas Michael.

Di MTB ini, lanjut politisi Demokrat ini, Tim Komisi V akan meninjau Bandara Udara Mathilda Batlayeri, Pelabuhan Laut Saumlaki, infrastruktur jalan nasional Saumlaki-Arma, pembangunan Air Bersih di Desa Bomaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, dan pembangunan rumah khusus di Desa Lauren, Kecamatan Tanimbar Selatan.

Kedatangan Tim Komisi V disambut Bupati MTB Petrus Fatiolon beserta unsur Forkopimda Kabupaten Maluku Tenggara Barat di Bandara Udara Mathilda Batlayeri, Saumlaki. Sebelum meninggalkan Bandara Udara Mathilda Batlayeri, Tim Komisi V disambut dengan acara adat oleh tua-tua adat amtufo serta

suguhan tarian adat Tanimbar di depan terminal bandara.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati MTB Petrus Fatiolon menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten MTB bersama masyarakat mengapresiasi Kunjungan Komisi V DPR RI ke MTB. Menurutnya, ada beberapa infrastruktur penunjang yang dititipkannya kepada Komisi V untuk dikembangkan, seperti Bandara Udara Mathilda Batlayeri dan Pelabuhan Laut Saumlaki, infrastruktur jalan dan jembatan serta infrastruktur dasar lainnya.

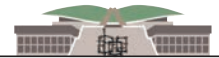
“Harapan kami, Komisi V dapat mewujudkan pembangunan lebih khusus sesuai tupoksi Komisi V yang ada yaitu infrastruktur,” harapnya.

Turut serta dalam kunjungan ini, Wakil Ketua Komisi V Sigit Sosiantomo, Anggota Komisi V antara lain Ade Rezki Pratama, Umar Arsal, Willem Wandik, A. Bakri, Hj. Nurhayati, Sahat Silaban dan Lalu Gede Syamsul Mujahidin. Tim juga didampingi oleh Mitra Kerja Komisi V antara lain Kasubdit Prasarana Bandara Udara Cecep Kurniawan, Direktur Jembatan Hedy Rahadian dan Direktur PSDM Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Priyono. ■

(sc) Foto: Suci/tnr



Tim Komisi V DPR RI meninjau Bandara Udara Mathilda Batlayeri di Saumlaki, Maluku Tenggara Barat.



# Rotasi Pimpinan Komisi DPR dari Fraksi Demokrat Suatu Kewajaran



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto berfoto bersama dengan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron dan Satya Widya Yudha usai pelantikan di Jakarta

Usai melantik Anggota DPR RI Herman Khaeron sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR, Wakil Ketua DPR Korinbang Agus Hermanto menyatakan kepada media bahwa rotasi atau pergantian pimpinan komisi yang dilakukan oleh partai Demokrat merupakan hal yang wajar.

**A**gus menyatakan, rotasi pimpinan adalah sesuatu hal yang biasa dan wajar. Itu merupakan bentuk penyegaran, la menjelaskan bahwa Herman Khaeron sudah delapan tahun di Komisi IV, tentunya harus mendapatkan ilmu-ilmu dan pengalaman yang baru. Walaupun masih dalam satu area, dimana dahulunya di pertanian sekarang di pertambangan.

"Ini merupakan suatu pengalaman-pengalaman, sehingga kita harus memberikan hal yang lebih baik. Untuk itu memang fraksi memandang, Pak Herman Khaeron sudah saatnya untuk memegang tampuk pimpinan, yaitu sebagai Wakil Ketua di Komisi VII," ujar Agus Hermanto di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/10).

Sementara dikesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi VII yang baru dilantik Herman Khaeron menyampaikan bahwa ada tugas besar yang terkait dengan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, yakni menuju kepada kedaulatan pangan dan kedaulatan energi.

"Dua-duanya memiliki roadmap yang sama dan menjadi tujuan negara, dan

keduanya sama-sama menjadi hajat hidup masyarakat Indonesia. Penugasan dari Fraksi dan Pimpinan Partai kepada saya di Komisi VII ini, tentu juga sama seperti apa yang menjadi tugas saya sebelumnya di Komisi IV. Saya harus menunjukkan sesuatu yang lebih baik dan bermanfaat bagi negeri ini," ujar Herman.

PR (pekerjaan rumah-red) yang ditinggalkannya di Komisi IV, mudah-mudahan dilanjutkan oleh kepemimpinan yang baru nanti, lanjutnya. "Ada tiga Undang-Undang yang sudah masuk ke pembahasan satu, dan yang duanya sudah diputuskan. Ini harus segera diselesaikan. Panja-Panja juga tentu nanti kami serahkan kepada Pimpinan yang baru," jelasnya.

Berikut adalah pergantian Pimpinan Komisi dari Fraksi Demokrat, Wakil Ketua Komisi V Michael Wattimena menggantikan posisi Herman Khaeron menjadi Wakil Ketua Komisi IV. Herman Khaeron menempati posisi Wakil Ketua di Komisi VII menggantikan Mulyadi. Sementara itu posisi Michael Wattimena di Komisi V ditempati Anton Sukartono Suratno. ■

**PENGAWAS UMUM**  
Pimpinan DPR RI  
**PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH**  
Achmad Djuned, S.H., M.Hum. (Sekjen DPR RI)  
**WAKIL KETUA PENGARAH**  
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Persidangan)  
**PIMPINAN PELAKSANA**  
Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)  
**PIMPINAN REDAKSI**  
Drs.Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)  
**WK. PIMPINAN REDAKSI**  
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),  
Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis),  
Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)  
**REDAKTUR**  
Mastur Prantono, Suciati, S.Sos  
**SEKRETARIS REDAKSI**  
Hasri Mentari, Guntur Dewanto  
**ANGGOTA REDAKSI**  
Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen,  
Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra  
Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega  
**REDAKTUR FOTO**  
Eka Hindra, Iwan Armanias  
**FOTOGRAFER**  
Doeh Soepardi, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,  
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief  
Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah  
**ADMINISTRASI FOTO**  
Bagus Mudjiharjanto  
**ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA**  
Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI  
Gedung Nusantara II Lt. 3  
Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta  
Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,  
e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com, www.dpr.go.id/berita



**PENERBITAN**  
**PIMPINAN PENERBITAN**  
Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan)  
**PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI**  
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)  
**STAF PRODUKSI**  
Subadri, S.E, Barliansyah,  
Fathurrahman, Abdul Kahfi, S. Kom  
**DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Drs. Karyanto (Kasubag Distribusi)  
**ADMINISTRASI**  
Sjaefudin, S.Sos  
**KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Mujiono  
**PHOTOGRAFER ART**  
Friederick Munchen  
**STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Arif, Lamin, Remon,  
Yuliana Puspita, Ifan, Izzi Fauzul Umam  
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421  
Email : penerbitandpr@gmail.com

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN



Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menerima laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) beserta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I tahun 2017 dari Ketua BPK di Jakarta

## IHPS Harus jadi Acuan Pengalokasian Anggaran Kementerian dan Lembaga

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) beserta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I tahun 2017 diharapkan menjadi acuan dasar pengalokasian anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada Kementerian atau Lembaga (K/L). IHPS yang diserahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kepada DPR RI, didorong bukan sebatas rutinitas atau laporan administratif.

**W**akil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menekankan, Kementerian Keuangan sebagai bendahara negara didorong menggunakan IHPS sebagai dasar pemberian alokasi anggaran berdasar kinerja K/L. Sehingga, alokasi keuangan negara ke setiap K/L, dapat disesuaikan dengan kinerja masing-

masing K/L dalam opini yang diberikan oleh BPK RI.

"Jangan sampai K/L yang mendapat opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau Disclaimer Opinion diberi anggaran lebih. Jangan juga, K/L yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) disamakan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," kata Taufik usai

memimpin Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian IHPS I dari Ketua BPK RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10).

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan itu memastikan, IHPS ini merupakan kewajiban konstitusional BPK RI yang harus disampaikan ke DPR RI. DPR RI

pun akan meneruskan IHPS ini kepada Alat Kelengkapan Dewan (AKD) atau komisi terkait, untuk ditindaklanjuti.

“Kita harapkan setiap komisi dapat menindaklanjuti IHPS itu sesuai dengan mitra kerjanya masing-masing. Dan pengawasan yang dilakukan komisi bukan hanya sekedar rutinitas, tapi dioptimalkan,” pesan politisi F-PAN itu.

Sebelumnya, Ketua BPK Moermahadi Soerjaj Djanegara mengatakan, IHPS I memuat 687 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Dari sejumlah LHP itu, terungkap sebanyak 9.729 temuan yang meliputi 14.997 permasalahan yang berpotensi merugikan negara senilai Rp 27,39 triliun. Sebanyak 687 LHP itu terdiri dari 113 LHP pemerintah pusat, 537 LHP pemerintah daerah, dan 37 LHP BUMN dan badan lainnya.

Moermahadimemaparkanpermasalahan tersebut meliputi 7.284 (49 persen) kelemahan sistem pengendalian Internal (SPI), 7.549 (50 persen) ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp 25,14 triliun serta 164 (1 persen) permasalahan ketidakehematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp 2,25 triliun.

Permasalahan ketidakpatuhan mengakibatkan kerugian sebanyak 3.135 (67 persen) senilai Rp 1,81 triliun dan potensi kerugian sebanyak 484 (10 persen) senilai Rp 4,89 triliun, serta kekurangan penerimaan sebanyak 1.088 (23 persen) senilai Rp 18,44 triliun.

“Atas permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan tersebut, pada saat pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyerotor ke kas negara maupun daerah sebesar Rp 509,61 miliar atau 2 persen,” urai Moermahadi.

Moermahadi menambahkan, hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Atau Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) tahun 2016 menunjukkan bahwa 73 LKKL (termasuk LK BPK) dan 1 LKBUN memperoleh opini WTP, 8 LKKL memperoleh opini WDP, dan 6 LKKL telah memperoleh opini TMP.

Sementara dari 537 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2016, menunjukkan bahwa 375 LKPD memperoleh opini WTP, 139 LKPD mendapat opini WDP, dan 23 LKPD memperoleh opini TMP. ■

(sf), Foto: Andri/hr

## Fahri Hamzah Kita Harus Terus Kritis pada Negara

Dalam rangkaian kunjungan ke Surabaya, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dan rombongan menyempatkan diri mengunjungi Kantor Jawa Pos Grup di Graha Pena Surabaya. Dalam kunjungan tersebut, Fahri Hamzah meninjau ruang kerja wartawan dan ruang kerja kolom remaja yang berdiri sendiri di jejaring koran Jawa Pos Grup.

**K**emudian, Fahri Hamzah diajak untuk melihat berbagai merchandise dan berbagai koleksi Jawa Pos dalam olahraga yang merupakan kenang-kenangan olahragawan dunia yang pernah berkunjung ke gedung tersebut. Dalam kunjungan ke berbagai tempat tersebut, Wakil Pimpinan Redaksi Jawa Pos Nanang juga menjelaskan sebuah piagam dari WAN IFRA. “Jawa Pos pernah menjadi media terbaik dunia pada tahun 2011 World Young Reader Prize, bang,” kata Nanang, Senin (2/10).

Saat diskusi yang berlangsung di ruang rapat Jawa Pos, Fahri mengapresiasi kerja media Jawa Pos yang mampu menjangkau ke banyak pembaca. Dalam diskusi tersebut juga, Fahri berpesan agar media dan kita semua terus kritis pada negara. “Saya selalu hadir dengan sikap kritis, agar negara tak lupa akan tugasnya,” imbuah Fahri.

Fahri juga mengkritik situasi penegakan hukum di negara kita yang justru melenceng dari tujuannya. Hukum harusnya memiliki efek lahirnya perasaan tenang dan dengan perasaan tenang itu, melahirkan banyak pikiran dan sikap berani serta lahir inovasi dan kreativitas bangsa.

Di akhir diskusi, salah satu Pimpinan Redaksi Jawa Pos menyampaikan salam dari Dahlan Iskan untuk Fahri. Pertemuan diakhiri dengan foto bersama seluruh yang hadir. ■

(sc), Foto: dok/andri/hr

## Jawa Pos



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat mengunjungi Kantor Jawa Pos Group di Graha Pena Surabaya.

# Gagasan *Open Parliament* Sejalan dengan Parlemen *Modern*

*Indonesian Parliamentary Centre* (IPC) mengusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk menerapkan *Open Parliament* Indonesia, dimana saat ini Pemerintah Indonesia telah menerapkan *Open Government* Indonesia. Keterbukaan informasi menjadi salah satu hal yang dikedepankan dalam *open parliament*. Gagasan ini pun dinilai sejalan dengan DPR RI yang saat ini sedang menuju Parlemen Modern

**W**akil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan, gagasan *open parliament* ini diperlukan, terutama untuk menjadikan DPR yang lebih terbuka. Hal itu dikatakannya saat menerima Direktur Indonesia Parliamentary Center (IPC) Ahmad Hanafi beserta jajarannya, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (2/10).

Dalam kesempatan itu, hadir juga Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI Djaka Dwi Winarko dan Kepala Bagian Humas Setjen DPR RI Dadang Prayitna.

“Pada prinsipnya, kami mendukung gagasan parlemen yang terbuka. Selama ini, menurut saya, DPR RI termasuk salah satu parlemen yang terbuka, tidak hanya di Asia Tenggara, bahkan di dunia. Gagasan *open parliament*, saya kira ini adalah satu hal yang memang bagus, dan sejalan dengan apa yang dicanangkan DPR, yakni menuju Parlemen Modern,” jelas Fadli.

Fadli menambahkan, DPR RI membuka akses informasi melalui berbagai media teknologi informasi, seperti situs resmi DPR RI, hingga beberapa media sosial resmi, seperti Facebook, Instagram, Twitter, hingga Youtube. Sehingga, berbagai hasil rapat, baik rapat paripurna, rapat komisi, rapat panja, hingga rapat pansus yang bersifat terbuka, bisa diakses oleh masyarakat luas.

“Kita perlu terbuka, dan memberikan kesempatan agar ada kritik dan masukan kepada DPR RI. Bahkan kedepannya, jika diperlukan dari hasil risalah juga bisa diakses,” imbuh politisi F-Gerindra itu.

Namun Fadli tak memungkiri, masih ada beberapa kendala untuk mencapai hal itu. Seperti masih minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang arsip, hingga hal-hal teknis operasionalisasi. Menurutnya, khusus untuk bidang arsip, membutuhkan keahlian khusus. Namun ia memastikan, hal ini dapat segera diselesaikan.

“Yang kita hadapi adalah kendala teknis, baik SDM maupun operasionalisasi. Keseriusan kita tunjukkan dengan upaya pembenahan. *Open government* punya karakter yang berbeda dengan *open parliament*. Pencapaian atau hasil-hasil parlemen akan beda dengan eksekutif. Parlemen sesuai dengan tugasnya, yakni legislasi, pengawasan, anggaran maupun diplomasi parlemen dan representasi rakyat,” tutup politisi asal dapil Jawa Barat itu.

Sebelumnya, Direktur Indonesia Parliamentary Center IPC Ahmad Hanafi menekankan, pihaknya memberikan rekomendasi untuk mendukung keterbukaan informasi, guna mendukung Parlemen Modern. Rekomendasi itu diantaranya pembenahan sarana dan prasarana di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), penambahan arsiparis, perbaikan daftar informasi publik, hingga redesain situs DPR.

Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Djaka Dwi Winarko mengakui, masih ada beberapa hal teknis yang masih menjadi kendala, seperti sulitnya permintaan data maupun arsip, dan minimnya personel arsiparis. ■



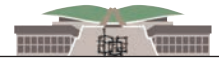
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon



“Besarnya harapan kami, kerjasama Indonesia dan Hungaria di bidang pendidikan dapat terus meningkat,” kata Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan saat pertemuan dengan Wakil Ketua Majelis Nasional Hungaria Janos Latorçai di Gedung Parlemen Hungaria di Budapest, Hungaria, Kamis (28/9/2017). Kunjungan yang diikuti oleh beberapa Anggota DPR RI lintas komisi dan fraksi, juga didampingi oleh Perwakilan Duta Besar Republik Indonesia Untuk Hungaria.

Pimpinan DPR Bidang Korekku ini menambahkan, setelah krisis ekonomi global pada 2008,

(sf.rmp) foto: abulhr



Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan bersama Anggota DPR RI melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua Majelis Nasional Hungaria.

## Taufik Kurniawan Harapkan Kerja Sama Pendidikan dan Ekonomi Indonesia - Hungaria Meningkat

Bidang pendidikan Hungaria telah mendapatkan penghargaan Nobel maupun menyumbang inovasi dan dedikasi kepada dunia Internasional. Bahkan sepanjang 1905-2002 terdapat enam ilmuwan asal Hungaria yang telah meraih penghargaan Nobel. Majunya pendidikan Hungaria, mendorong Indonesia untuk meningkatkan hubungan kerja sama bidang pendidikan antara kedua negara.

perekonomian Indonesia terhitung semakin membaik dengan pertumbuhan kumulatif sebesar 5,01 persen pada kuartal II tahun 2017. Kestabilan pertumbuhan ekonomi Indonesia harus dapat dijadikan

momentum untuk meningkatkan kerjasama Indonesia dan Hungaria di bidang perdagangan.

“Kedua negara berpotensi besar untuk meningkatkan kerjasama ekonomi melalui

Diplomasi Parlemen. Indonesia memiliki banyak potensi yang dapat digali oleh investor. Beberapa sektor tersebut meliputi sektor pariwisata dan energi terbarukan,” tambah politisi F-PAN itu.

Apalagi, tambah Taufik, Indonesia, Hungaria dan negara-negara maju dan berkembang lain telah menandatangani deklarasi komitmen pemanfaatan energi baru dan terbarukan pada di Bali Clean Energi Forum (BCEF) 2016. Pemanfaatan energi baru dan terbarukan ini merupakan hal yang tidak terelakkan lagi sebab terlalu bergantung pada energi fosil merupakan hal yang sangat beresiko.

“Sejak 2016 Indonesia telah berperan untuk meneliti, mengembangkan, mengedukasi, meningkatkan kapasitas pelaksanaan, hingga memfasilitasi investasi dalam pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan energi baru dan terbarukan seperti tenaga matahari, angin, biomassa, gelombang laut, energi air, hingga panas bumi,” jelas Taufik.

Taufik tak memungkiri dari beberapa pertemuan di forum internasional, eratnya hubungan antara Indonesia dengan Hungaria sudah tidak diragukan lagi. Hal itu pun terlihat dari visitasi turis Hungaria ke Indonesia telah meningkat setiap tahun, total turis Hungaria sebanyak 6.392 pada 2014 yang notabene meningkat dari total turis Hungaria sebanyak 6.006 pada 2013.

“Indonesia telah memberikan program bebas visa kepada Hungaria. Bahkan visitasi turis Hungaria sempat menjadi yang tertinggi se-Eropa sebesar 19 persen pada kuartal I tahun 2015,” apresiasi politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Sementara itu, Janos Latorçai mengatakan hubungan politik kedua negara sangat baik, karena hubungan kerja sama politik sudah terjalin selama puluhan tahun. Menurutnya, Indonesia adalah negara yang memiliki umat muslim terbesar di dunia, sehingga hubungan kerja sama kedua negara diharapkan semakin erat.

“Ada dua kerja sama yang sangat penting antara kedua negara, yakni ekonomi dan pendidikan. Sejak tahun 2013, saya juga banyak menerima kunjungan rektor-rector dari Indonesia. Saya memberikan andil agar hubungan kerja sama pendidikan lebih erat dan meningkat,” komitmen Janos. ■

(sl/mp). Foto: sofyant/hr.

# Kepuasan Dewan Terhadap BKD Semakin Meningkat

Kepuasan Dewan terhadap kinerja Badan Keahlian DPR RI (BKD) semakin meningkat, hal itu diperoleh berdasarkan survei internal yang menyatakan 72,65 persen dewan menyatakan puas terhadap kinerja BKD. Hal itu diungkapkan Kepala BKD Johnson Rajagukguk saat membuka Seminar Nasional yg bertajuk 'Optimalisasi Peran Masyarakat Dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang' Selasa (3/10) di Crowne Plaza Hotel, Jakarta.



Kepala BKD DPR RI Johnson Rajagukguk menjadi narasumber pada Seminar Nasional di dampingi pembicara lainnya.

“Secara keseluruhan hasil survey internal terhadap BKD menunjukkan hasil kepuasan dewan sebesar 72.65 persen,” ujar Johnson yang kemudian diiringi oleh tepuk tangan para hadirin seminar.

Sebagaimana diketahui, BKD adalah sistem pendukung di DPR yang memiliki tugas memberikan bantuan keahlian terhadap fungsi dan tugas dewan. Beberapa dukungan keahlian yang diberikan adalah membuat

naskah akademik hingga pendampingan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang.

“Pertu disampaikan BKD merupakan badan baru meskipun fungsinya sudah lama ada, secara organisatoris baru dibentuk yang tugasnya memberikan dukungan keahlian sebagaimana diamanatkan UU No 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD,” tutur Johnson.

Dalam meningkatkan tugas dan fungsinya ini, BKD menggelar seminar nasional guna mengoptimalkan peran masyarakat dalam pembentukan undang-undang, salah satu yang dibahas adalah perumusan suaru sistem partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan. “Sehingga perlu dirumuskan suatu sistem partisipasi masyarakat dalam penyusunan naskah akademik dan RUU yang diatur secara jelas dan lebih komprehensif,” sambung Johnson.

Disatu sisi, tugas BKD ke depan juga semakin berat seiring dengan adanya peningkatan jumlah RUU inisiatif DPR. “Pada saat ini berdasarkan data prolegnas 2017, menunjukkan adanya peningkatan jumlah RUU yg akan menjadi inisiatif DPR,” tukas Johnson.

Meskipun sudah mencapai kepuasan berdasarkan hasil survei, BKD akan terus meningkatkan kinerjanya guna memberikan dukungan keahlian kepada Dewan. Tak hanya meningkatkan kualitas *legal drafter*, tetapi BKD juga sudah menjalin kerjasama dengan berbagai kampus di Indonesia untuk mengoptimalkan aspirasi dalam pembentukan undang-undang.

“Pintu masuk masyarakat dalam pembentukan UU adalah melalui penyusunan naskah akademik. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan RUU sangat penting agar komprehensif dan mendalam. Kita juga sudah menjalin kerja sama dengan berbagai kampus diantaranya Universitas Sumatera Utara, Universitas Andalas, UGM, Universitas Nasional, UIN Jakarta hingga Universitas Tadulako,” pungkas Johnson.

Turut serta dalam seminar ini, diantaranya Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Enny Nurbaningsih dan Ketua Mahkamah Konstitusi 2013-2015 Hamdan Zoelva. Selain itu, sejumlah *legal drafter* dari BKD juga turut serta dalam seminar ini. ■

(fhs) foto: runi/andri/hr

## Keterlibatan TNI Akan Diatur Dalam UU Pencegahan Teroris

Terkait rencana keterlibatan TNI dalam tindak pidana teroris akan diatur dengan baik dalam RUU tentang Terorisisme. Hal ini, agar ada kerja sama antara TNI dan Kepolisian.

Hal tersebut diungkapkan anggota Pansus RUU Pencegahan Terorisisme M. Nasir Djamil dalam diskusi RUU Pencegahan Terorisisme di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10).

Turut hadir dalam diskusi tersebut pengamat militer dari Imparsial Al-Araf,

dan peneliti Puskamnas dari Universitas Bhayangkara, Juni Thamrin.

“TNI tidak lagi harus menunggu permintaan polisi untuk melakukan tindakan pencegahan terorisisme. Tapi, tugasnya sama dengan polisi, dan itu dalam cara operasionalnya akan diatur dalam RUU ini, agar tugasnya lebih jelas,”





Anggota DPR RI M. Nasir Djamil usai menjadi pembicara pada diskusi RUU Pencegahan Terorisme di Jakarta

tegas Nasir Djamil.

Bekerjasama antara militer dan polisi, menurutnya, akan mampu mencegah lebih dini terhadap tindak pidana terorisme di wilayah Indonesia. "Kita juga berharap kerja TNI dan Polisi profesional sehingga tidak melanggar UU dan peraturan yang berlaku. Tindakan militer harus berpegang pada aturan hukum," ujarnya.

RUU Terorisme ini sangat diperlukan untuk mengatasi masalah teroris yang makin kuat dengan dasar hukum untuk mencegah. "Jangan sampai terjadi masalah hukum ketika memproses seseorang yang diduga teroris akibat belum ada UU Terorisme ini, sehingga menggunakan UU hukum pidana biasa," kata politisi PKS ini.

Ia menjelaskan, bahwa dilibatkannya TNI tersebut adalah agar bersama-sama dengan kepolisian bisa mencegah terorisme lebih efektif dan apalagi sampai mengancam pertahanan dan keamanan negara. "Penguatan militer di RUU ini sudah dimasukkan di salah satu pasal," pungkasnya.

Sementara itu AI Araf menilai perlunya BNPT ditingkatkan dari badan menjadi lembaga setingkat menteri, agar bisa berkoordinasi dengan TNI, Polri, BIN, Bea Cukai dan Keimigrasian. "Dengan setingkat kementerian, maka tak lagi di bawah Menkopolkum," tambahnya.

Koordinasi itu diperlukan untuk membagi tugas masing-masing sesuai fungsi TNI, Kepolisian, Keimigrasian, Bea Cukai, dan BIN. Mengapa? Sebab, tak mungkin bisa melakukan teknis operasional dalam pemberantasan terorisme tersebut.

"Jadi, keterlibatan TNI dimungkinkan, tapi bukan dengan Keppres. Khususnya terkait dengan ancaman dan pertahanan negara, meski itu bisa dengan UU TNI," ungkapnya. ■

(sc)

## Negara Mutlak Berkuasa Atas Air

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo mengatakan RUU Sumber Daya Alam yang sedang dibahas DPR harus mampu mengatur penguasaan penuh negara atas air. Negara harus mampu memenuhi hak rakyat atas air.

“Bagaimana negara mutlak berkuasa atas air yang ada dan kemudian bisa didistribusikan kepada setiap orang.

Hak warga atas air itu yang paling penting,” jelas Sigit dalam RDP Komisi V dengan beberapa *stakeholders*, diantaranya Perhimpunan Ahli Airtanah Indonesia (PAAI), Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan Himpunan Ahli Teknik Hidraulik (HATHI) di Gedung DPR RI, Senayan, Rabu (28/09).

Dalam diskusi tersebut, mengemuka adanya pembentukan badan atau otorita air yang akan mengatur pengelolaan

SDA secara terpadu. Diakui Sigit, pengelolaan air saat ini multikompleks karena ditangani berbagai kementerian. Misalnya, air permukaan ditangani Kementerian PUPR, air bawah tanah oleh Kementerian ESDM, air baku dan embung dan pencemarannya masuk ke ranah Kementerian LHK.

Belum lagi, pihak swasta yang memiliki konsesi pengelolaan sumber mata air, sehingga perlu ada rekalkulasi terhadap kepemilikan quota air. "Ini akan kita atur kembali, sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 33, kita ingin memastikan bahwa negara berkuasa mutlak dalam air, apakah air permukaan, apalagi air tanah yang disedot untuk komersialisasi," sambungnya.

Politisi PKS ini juga menambahkan, keterlibatan swasta akan diatur sedemikian rupa yang memungkinkan swasta bekerjasama dengan BUMN atau BUMD untuk menghasilkan air layak minum. Dimana akses air minum aman nasional per tahun 2016 baru mencapai 71.14 persen.



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo

"Di lain sisi, kita tidak boleh melihat peranan swasta itu momok, karena sebagian swasta masuk di PDAM sehingga air bisa dinikmati sampai ke end user Rp 7/liter. Karena itu ini akan jadi konsen kami, sehingga pasal-pasal nya akan semakin jelas, bagaimana peran swasta, peran sektor ketiga untuk menjamin setiap warga, masyarakat dan seluruh penduduk Indonesia bisa mengakses air bersih dengan mudah dan layak," tutupnya. ■

(ann.mpo), foto: kresno/hr

# SN Dikti Perlu Sinkronisasi Antara Perguruan dan Kementerian



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ferdiansyah saat memimpin kunjungan Panja SN Dikti dengan beberapa Rektor dan Direktur Pendidikan Tinggi Yogyakarta di Gedung Gubernur DI Yogyakarta.

Pelaksanaan Standardisasi Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) membutuhkan sinkronisasi antara Lembaga Pendidikan Tinggi dengan Kementerian Riset Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) yang menaunginya. Dengan demikian akan menopang peningkatan mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi

“Apapun yang tidak sinkron, masalah yang ada di dalam dunia pendidikan tinggi, misalnya dalam konteks akreditasi dinilai Kemenristek Dikti bagus tapi akreditasinya B. Harusnya ini menjadi linear yang bersamaan lurus tidak berbanding terbalik seperti apa yang terjadi sekarang. Ini harus dikoreksi sehingga memperkecil disparitas yang masih banyak di antara perguruan tinggi itu sendiri,” ungkap Wakil Ketua Komisi X DPR Ferdiansyah saat memimpin kunjungan Panja SN Dikti dengan beberapa Rektor dan Direktur Pendidikan Tinggi Yogyakarta di Gedung Gubernur DI Yogyakarta, Jumat (30/9) lalu.

Permasalahan lainnya yang menyangkut sinkronisasi adalah masih lambannya perkembangan akademik, termasuk penambahan maupun perubahan program studi yang kurang luwes. Rektor ISI (Institut Seni Indonesia) Yogyakarta M Agus Burham menyatakan pihaknya telah mengusulkan Prodi baru, tapi kemudian tidak terwujud karena tidak mendapatkan ijin. Hal ini disesalkan oleh anggota Panja SN Dikti Dadang Rusdiana “Padahal pengembangan program studi itu sesuai dengan tuntutan pasar, sejalan dengan perkembangan zaman, seharusnya Kemenristekdikti tidak kaku dengan alasan tidak ada yang nomenklatur,” ujarnya

Secara normatif SN Dikti dimaksudkan agar Perguruan Tinggi di Indonesia mampu menghasilkan lulusan yang punya kompeten dan mempunyai daya saing dengan yang lain.

“Apa yang dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi ini adalah sebuah terobosan bagus dalam rangka menghadapi perubahan zaman maupun tantangan di pasar pendidikan yang seharusnya didukung,” ujar politisi Hanura ini lagi. ■

(ran/mp)

## Minimnya Sarpras Kampus di Luar Jawa Jadi PR Pemerintah

Jangan disamakan perkembangan antara perguruan tinggi di Pulau Jawa dan Perguruan Tinggi di luar Jawa, seperti Kalimantan yang dekat dengan perbatasan. Masih minimnya sarana dan prasarana kampus, misalnya laboratorium komputer dan penelitian yang sangat kurang, begitu juga dengan dosennya yang juga masih kurang

“Ini menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah pusat untuk turun langsung ke daerah-daerah seperti ini,” kata anggota Tim Kunspek Panja Standar Nasional Pendidikan Tinggi Komisi X DPR Asdy Narang dalam kunjungan kerja di Kantor Senat



Universitas Tanjungpura Pontianak Jumat (29/9).

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, standar nasional pendidikan ini sangat berkaitan dengan anggaran. “Jika anggaran tidak ada, bagaimana mungkin bisa mencapai standar nasional. Bagaimana juga bisa membangun Universitas yang bagus yang mampu bersaing dengan negara tetangga. Itu yang penting,” tukasnya.

Asdy mengatakan, selama dua periode di Komisi X DPR sebenarnya yang ditemukan permasalahannya itu itu saja. Meski demikian pihaknya akan terus berjuang demi pendidikan bangsa Indonesia yang lebih bagus lagi.

Politisi dari dapil Kalimantan Tengah ini menjelaskan, Pak Jokowi memiliki prinsip membangun dari daerah perbatasan dan pinggir Indonesia. Seharusnya Kemenristekdikti juga harus turun ke daerah terluar, terdepan dan tertinggal (3T) ini agar mendapat temuan yang jelas yang ada di lapangan. Beberapa temuan tersebut kata Asdy akan dibawa dan dirapatkan segera dengan Kemenristekdikti.

Dalam pertemuan tersebut turut hadir, Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Swasta (PTS), Kepala Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta XI (Kopertis), Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Barat dan perwakilan mahasiswa dari Politeknik Negeri Sambas. ■



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat menghadiri sidang pimpinan Parlemen Multilateral yang tergabung dalam MIKTA di Istanbul, Turki.

## DPR Promosikan Kekuatan Pancasila Ke Pimpinan Parlemen Lima Negara MIKTA

Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan rakyat, Fahri Hamzah menjelaskan Pancasila yang dianut Indonesia telah berhasil menunjukkan kekuatannya dalam berbagai ujian stabilitas.

**H**al tersebut diungkapkannya dalam sidang pimpinan Parlemen Multilateral yang tergabung dalam MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia), Istanbul, Kamis (27/9).

“Pancasila berhasil mengatasi berbagai persoalan kecemasan yang kadang-kadang justru dicurigai berasal dari negara lain yang sengaja memproduksinya,” ujar Fahri yang memimpin delegasi BKSAP (Badan Kerjasama Antar Parlemen) DPR RI di Istanbul, Turki, selama dua hari 28-29 September 2017.

Pada kesempatan itu, Fahri sengaja mempromosikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat universal dan kebenarannya tidak bisa di gugat. Ia menilai kemungkinan di banyak negara tidak terlalu paham bahwa akar permasalahan dalam isu kemanusiaan adalah pemahaman yang keliru tentang kesetaraan

dan persaudaraan. Kecemasan di manufaktur sehingga menimbulkan kebenciandan xenophobia.

Dilanjutkannya, saat ini dunia memang diwarnai isu mobilisasi meliputi migrasi dan pengungsi. Jika migran yang lebih menyangkut pencari kerja bermakna ekonomis bagi negara, maka pengungsi lebih ke pencarian suka, maknanya bisa berupa ancaman. Pada kesempatan itu, Pimpinan Parlemen lima negara menginginkan nasionalisme yang berlebihan tidak boleh menghalangi negara untuk menolong negara lain dengan landasan kemanusiaan.

“Kedepan harus ada kerjasama yang lebih intensif diantara negara-negara MIKTA untuk bisa menyelesaikan krisis kemanusiaan baru yang sedang terjadi,” tambah Fahri seraya mengusulkan sebuah platform bersama negara-negara MIKTA yang mengacu pada kesadaran saling membantu atas dasar kemanusiaan. ■



Anggota DPR RI Asdy Narang

# Peringatan Kesaktian Pancasila Tegaskan Komitmen Ideologi Negara





Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menegaskan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila merupakan komitmen ideologi negara. Pсалnya ujian-ujian kepada ideologi negara itu berjalan terus menerus, terjadi terus menerus. "Ini yang harus kita hadapi. Dan saya kira hari ini kita menegaskan komitmen dan tekad bahwa Pancasila sebagai ideologi negara layaklah kita pertahankan," tandas Fahri, di Kompleks Lubang Buaya, Jakarta Timur, Minggu Pagi (1/10).



Presiden Joko Widodo bertindak sebagai Inspektur Upacara pada peringatan hari Kesaktian Pancasila di dampingi Pimpinan MPR/DPR/DPD di Lubang Buaya.

Dalam rangkaian acara ini Presiden Joko Widodo bertindak sebagai inspektur upacara. Sebelumnya, teks Pancasila dibacakan oleh Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang. Upacara tahunan yang dihadiri Presiden, Wapres para Menteri Kabinet Kerja dan Pimpinan Lembaga Negara tersebut berlangsung khidmat, termasuk para Dubes negara sahabat serta undangan lainnya.

Tugas pembacaan naskah dan penandatanganan ikrar yang dilakukan Fahri tersebut sebagai wakil dari masyarakat. Dia juga berpesan memperingati Hari Kesaktian Pancasila seyogyanya dilakukan secara simbolis dan substantif. Simbolis bisa berupa upacara peringatan.

"Substantif itu kita perlu membaca makna sila-sila dari Pancasila bagi kehidupan kita. Sehingga kita menjadi bangsa yang berkeTuhanan, kemanusiaan, bersatu, bermusyawarah, berkeadilan," papar Fahri.

Berikut adalah naskah ikrar yang dibacakan Fahri:

"Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami yang melakukan upacara ini menyadari sepenuhnya:

Bahwa sejak diproklamasikan Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 pada kenyataannya telah banyak terjadi rongrongan baik dari dalam negeri maupun luar negeri terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurangwaspadaan Bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai Ideologi Negara;

Bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, Bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia

Maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ■

(eko/mp), Foto:Arnel/hr

# Pemerintah Daerah Diminta Terlibat Dalam Perlindungan TKI

Ketua Kunjungan Timwas TKI DPR RI Dede Yusuf meminta Pemerintah Daerah dapat terlibat langsung dalam pelaksanaan perlindungan terhadap TKI yang bekerja di luar negeri. Hal tersebut sesuai dengan salah satu rekomendasi yang dikeluarkan oleh Timwas TKI terkait pembenahan atas sinkronisasi Undang-undang Nomor 39/2014 tentang PPLIN yang diubah menjadi UU PPMI (Perlindungan Pekerja Migran Indonesia).



Timwas TKI yang di Pimpin Dede Yusuf berfoto bersama dengan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, di Bandung.

“Berbeda dengan UU No. 39/2014, di dalam UU yang direvisi ke depan akan memberikan ruang gerak yang lebih baik lagi bagi Pemerintah Daerah khususnya dalam melakukan perlindungan kepada calon TKI. Antisipasi dalam UU perlindungan TKI, Provinsi Jawa Barat (Jabar) ini sudah selangkah lebih maju daripada beberapa provinsi lain,” demikian dikatakan Ketua Timwas TKI Dede Yusuf saat memimpin Kunjungan Spesifik Timwas TKI DPR RI ke Bandung, Jawa Barat, Rabu (4/10).

Lebih lanjut politisi asal dapil Jabar ini menilai, dari jumlah 2 persen masalah yang dialami para TKI, berasal dari pendataan dokumen yang salah. “Apabila dokumen sudah lengkap, pelatihan dan pendidikan serta perlindungan hukum asuransi sudah benar, bisa dipastikan 80 persen jumlah TKI kita ini biasanya tidak terjadi masalah. Berdasarkan itulah ke

depan, tentunya kami berupaya untuk menguatkan kesepakatan antara negara-negara penerima TKI asal Indonesia terbanyak. Sehingga dapat memberikan kemudahan perlindungan terhadap TKI yang bekerja disana,” ungkapnya.

Politisi F-Demokrat ini menyayangkan jumlah angka tertinggi TKI ilegal yang menempatkan Provinsi Jabar pada peringkat pertama. “Tentunya ini sangat disayangkan dan menjadi concern kita bersama,” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut Gubernur Provinsi Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan dirinya akan melakukan penelitian lebih lanjut guna memperbaiki persoalan TKI di Jabar. Dia menduga hal tersebut terjadi karena adanya manipulasi pada bidang keahlian.

“Menurut Kemenaker standar pelatihan seorang TKI yakni kurang lebih selama 60 hari. Tapi di lapangan banyak ditemukan calon TKI yang sudah diberangkatkan pada pelatihan yang baru saja dilakukan selama 7 hari. Inilah hal yang bisa memunculkan beragam persoalan. Pengawasan kita terhadap penyalur tenaga kerja, saya kira harus distandarisasi dan diawasi dengan sangat ketat supaya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti itu di kemudian hari. ■

(tra.mp), Foto:tiara/hr

## Komisi IV Terima Masyarakat Desa Hutan Terkait Permen LHK No.39/2017

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Viva Yoga Mauladi didampingi anggota Komisi IV DPR, Ono Surono, dan Budi Satrio Djiwandono menerima aspirasi dari masyarakat sekitar hutan yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan kelompok tani desa hutan lainnya, terkait keberadaan Permen LHK No.39 Tahun 2017.

“Kami menerima sekitar 150 orang dari kelompok tani desa hutan se Pulau Jawa. Mereka menyampaikan aspirasinya terkait Peraturan Menteri No.39 Tahun 2017. Disini mereka merasa Permen tersebut merupakan harapan yang mereka impikan sejak lama. Dimana Permen tersebut telah memberikan hak pengelolaan dan pemanfaatan hutan

Perhutani kepada mereka (masyarakat sekitar hutan) masing-masing seluas dua hektar, selama 35 tahun dan bisa diwariskan. Oleh karena itu mereka sangat setuju dan mendukung Permen tersebut, mengingat selama ini mereka tinggal di sekitar lahan hutan, dan mengelola hutan namun belum memiliki dasar hukum yang jelas, karena selama ini hutan tersebut pengelolaannya

di bawah Perhutani,” ujar Viva di ruang rapat Komisi IV DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (28/9).

Apa yang dilakukan masyarakat tersebut menyusul aksi serupa yang dilakukan kelompok masyarakat lainnya beberapa waktu sebelumnya, yang meminta DPR untuk mendorong pencabutan Permen LHK No. 39 Tahun 2017. Kelompok ini menilai bahwa penerbitan Permen LHK No.39 Tahun 2017 ini rentan akan konflik horizontal di masyarakat. Karena kepemilikan lahan perhutani yang diberikan kepada kelompok tani tertentu. Tidak hanya itu, mereka juga beranggapan bahwa konservasi atau penyerahan pengelolaan hutan kepada



# Timwas TKI DPR Sosialisasikan Revisi UU TKI di Kalbar



Timwas TKI DPR RI saat melakukan kunjungan ke Provinsi Kalimantan Barat

DPR telah berhasil menyelesaikan pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) nomor 39/2004 mengenai TKI dan akan segera di sahkan pada masa sidang ini. Atas dasar itu, maka Tim Pengawas Tenaga Kerja Indonesia (Timwas TKI) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) yang merupakan salah satu pintu masuk dan keluarnya TKI.

“Kami kesini untuk melakukan pengawasan terkait keberadaan TKI di Kalbar yang merupakan daerah perbatasan dengan Malaysia,” jelas Ketua Tim Kunjungan Spesifik, Adang Sudrajat di Balai Petitih, Kantor Gubernur, Jalan Ahmad Yani Pontianak, Rabu (04/10)

Selain itu, lanjut Adang, tujuan dari kunspek ini juga untuk mensosialisasikan peraturan dari Revisi UU nomor 39/2004

tentang TKI. “Kami ingin melihat kesiapan daerah dalam menyambut perundang-undangan ini, bagaimana peranan Pemda dalam memberi perlindungan dan pembekalan kepada calon TKI yang akan keluar negeri. Sembari mensosialisasikan beberapa hal baru dalam revisi UU ini tetang tugas dan wewenang Pemda,” jelas Adang

Lebih lanjut, Adang memaparkan

masyarakat juga akan berdampak buruk terhadap kondisi hutan yang akan menjadi gundul dan rusak.

Menanggapi hal tersebut baik Viva, Ono maupun Budi Satrio sepakat untuk mempertemukan beberapa kelompok masyarakat, dengan pihak terkait seperti Perhutani dan Menteri Lingkungan Hidup untuk duduk bersama mendiskusikan hal tersebut, serta mencari solusi terbaiknya. Tidak hanya itu, Komisi IV juga akan meninjau kondisi yang terjadi di masyarakat desa hutan untuk melihat secara langsung apa benar Permen tersebut menimbulkan konflik di masyarakat. Dan sejauhmana peraturan tersebut membawa manfaat bagi masyarakat desa hutan secara keseluruhan.

“Kami akan panggil semua pihak terkait baik yang pro maupun kontra terhadap peraturan tersebut, serta akan kami undang juga pihak Perhutani dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga berbincang dengan sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), di Jakarta.

mengurai dan mendiskusikan bagaimanakah implementasi PP tersebut, dan sejauh mana manfaatnya bagi seluruh masyarakat. Kami juga akan mempertanyakan Perhutani, kesatuan pengelolaan hutan sudah berjalan sekian tahun tapi tidak membawa keuntungan secara ekonomis

salah satu peraturan baru yang harus dilaksanakan Pemda yaitu pendirian Layanan Terpadu satu atap (LTSA) dimulai dari level kabupaten/kota. Sejumlah dinas yang berhubungan dengan pengiriman TKI berada dalam LTSA tersebut.

“Masyarakat yang mau mendaftar sebagai TKI masuk ke sini, dia buat dokumen, kemudian diberi pembekalan olen Pemda,” ujar politisi F-PKS tersebut.

Hal senada juga disampaikan Anggota Timwas TKI, Ayub Khan yang mengatakan tujuan kunjungan spesifik ke Kalbar untuk mensosialisasikan Revisi UU tentang TKI yang akan segera di paripurnakan.

“Jadi kami menampung informasi yang disampaikan stakeholder terkait permasalahan TKI, sekaligus mensosialisasikan peran Pemda di dalam UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) nantinya,” jelasnya.

Tujuan pemberian wewenang kepada Pemda, lanjut Ayub untuk memberikan perlindungan kepada TKI serta mengurangi banyaknya TKI yang berangkat secara non prosedural. “Jadi nanti itu, proses rekrutmen dilakukan oleh Pemda sehingga tidak ada lagi TKI yang tidak terdata,” jelasnya.

Kunjungan ini juga diikuti oleh Masinton Pasaribu (F-PDIP), Dave Akbarshah Fikarno (F-Golkar), Andi Fauziah (F-Golkar), Suir Syam (F-Gerindra), Ayub Khan (F-Demokrat), Handayani (F-PKB), Saleh Partaonan Daulay (F-PAN), Muhammad Iqbal (F-PPP), Amelia Anggaraini (F-Nasdem) dan Frans Agung (F-Hanura). ■

(ria,mp) foto:ria/hr

(ayu,mp) Foto: Kresno/hr

# Komisi I Setujui Perjanjian Kerja Sama Pertahanan RI - Papua Nugini



Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin berbincang dengan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu usai Rapat Kerja dengan Komisi I, di Jakarta.

Komisi I DPR RI dan Pemerintah sepakat membawa RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan ke Pembahasan Tingkat II/Pengambilan Keputusan Rapat Paripurna.

**R**atifikasi perjanjian ini disepakati, setelah sebelumnya Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini

telah menandatangani persetujuan kerjasama pada Maret 2010 lalu di Port Moresby, Papua Nugini.

"Kami telah meratifikasi perjanjian

antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Papua Nugini. Di dalamnya memuat kerjasama pertahanan, tapi bukan fakta pertahanan. Ini kerjasama bidang pertahanan seperti pelatihan militer, informasi intelijen, pendidikan, dan lainnya," kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB.Hasanuddin usai memimpin rapat kerja, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10).

Hadir dalam rapat ini, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Wakil Menteri Luar Negeri A.M Fachir, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan Letjen TNI Agus Sutomo, serta sejumlah pejabat Kemenhan, Kemenlu dan Kementerian Hukum dan HAM.

Sebelumnya, sepuluh fraksi pun menyetujui pembahasan RUU ini sebelum pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).Hasanuddin mengungkapkan ada beberapa DIM yang dibahas, seperti ruang lingkup kerjasama, seperti pertukaran personel, pelatihan personel, berbagi informasi dalam bidang pertahanan, pertukaran intelijen, hingga kerjasama di bidang logistik.

"Perjanjian tahun 2010 antara kedua negara ini perlu kita ratifikasi, supaya kita bisa laksanakan.Setelah ini disahkan menjadi UU, dapat diaplikasikan oleh TNI dan tentara Papua Nugini, dan berlaku baik untuk di Indonesia maupun di Papua Nugini," kata politisi F-PDI Perjuangan itu.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu berharap, dengan diratifikasinya perjanjian itu, dapat memperkuat hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Papua Nugini, khususnya di bidang pertahanan. ■

(si.mp) foto: azka/hr

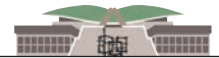


Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono

## Jual BUMN Harus Seizin DPR

Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono menyangkan rencana Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan yang mengusulkan ke Presiden Joko Widodo untuk menjual beberapa BUMN. Bambang mengingatkan bahwa dalam penjualan aset negara dalam nominal yang besar mesti mendapat persetujuan DPR. Hal itu diperlukan parlemen sebagai representasi dari rakyat.





**B**UMN merupakan aset negara, dalam undang-undang yang berlaku, memasukan dan mengeluarkan aset negara terbilang rumit sebagaimana tertuang dalam UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penjualan aset negara yang bernilai besar mesti mendapat persetujuan dari parlemen. “BUMN itu bukan milik pemerintah, BUMN itu adalah milik negara, milik rakyat Indonesia. Dan semua penjualan aset BUMN harus seizin wakil rakyat,” tandas Bambang, saat diwawancarai di ruang kerjanya, Gedung Nusantara I DPR RI, Selasa (3/10).

Bambang beranggapan, jika Luhut berencana merestrukturisasi BUMN yang tidak produktif diperbolehkan, tapi kalau menjual, harus seizin DPR. “Merestrukturisasi boleh, merubah pola

manajemen yang bobrok menurut saya boleh. Tapi menjual tidak boleh,” ujar Bambang.

BUMN didirikan sebagai amanah Pasal 33 UUD 1945 yang merupakan ikrar konstitusi ekonomi bangsa Indonesia, yaitu sebagai bentuk penguasaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Atas kebutuhan dari dua unsur tersebut BUMN ada, yaitu penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.

Sebagai contoh, negara memiliki kewajiban dalam penyediaan listrik untuk kepentingan umum, negara memiliki kewajiban untuk menjaga kebutuhan BBM nasional (termasuk BBM satu harga), negara memiliki kewajiban untuk menjaga stabilitas harga beras, garam, penyerapan gabah dan

garam dari pertanian rakyat, negara memiliki kewajiban untuk menjamin akses air bersih kepada masyarakat, dan negara memiliki kewajiban untuk mempermudah akses jalur transportasi antar pulau.

Oleh karenanya semua hal tersebut harus diselenggarakan BUMN agar kedaulatan atas kekayaan alam, kedaulatan ekonomi dan pelayanan kebutuhan dasar publik tetap berada di tangan negara dan negara bisa mengendalikan secara langsung.

Baru-baru ini Luhut menyoal dominasi BUMN, menurutnya, salah satu penyebab dominasi BUMN di ekonomi dalam negeri adalah jumlah BUMN dan anak usahanya yang sudah terlalu banyak dan besar. Hitungan Luhut, saat ini jumlah BUMN dan anak usaha BUMN mencapai sekitar 700 perusahaan. ■

(eko/sc) foto:odji/hr

## Komisi III Tetapkan 7 Calon Komisioner Komnas HAM

Komisi III DPR RI telah memilih tujuh calon Anggota Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dari 14 calon. Tujuh calon anggota tersebut dipilih setelah melalui serangkaian fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) yang digelar selama beberapa hari oleh Komisi III DPR RI.

**W**akil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa mengatakan, kendati tujuh nama calon anggota Komnas HAM telah terpilih, namun mendapat beberapa catatan dari beberapa partai politik, salah satunya dari F-PKS.

“Dari tujuh orang itu ada catatan. Catatan dari PKS ada dua orang. Orang tersebut bukan bagian yang disetujui PKS, tapi PKS menghormati musyawarah mufakat,” kata Desmond di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10).

Awalnya, tambah politisi F-Gerindra itu, F-PKS mengusulkan calon komisioner anggota Komnas HAM hanya lima orang. Namun, semua fraksi yang menghadiri rapat menilai jumlah calon komisioner Komnas HAM yang dipilih sebanyak tujuh orang. Opsi tersebut pun disepakati secara musyawarah.

“Ini yang paling ideal. Dari hasil elaborasi kami, kelihatan ada yang punya kapasitas dan tidak mempunyai kapasitas. Berdasarkan kapasitas-

kapasitas itulah, kami nilai orang ini layak,” imbuh politisi asal dapil Banten itu.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil membenarkan bahwa F-PKS memberikan catatan terhadap dua orang calon anggota Komisioner yang terpilih. Fraksinya mempertimbangkan mengenai integritas dan kompetensi calon. Menurut Nasir berdasar penilaian fraksinya, ada anggota petahana, yang mencalonkan kembali, yang kinerjanya tidak bagus ketika memimpin.

“Artinya, kita tahu selama ini Komnas HAM tidak ada keberhasilan-keberhasilan, dalam arti tidak mendapatkan apresiasi. Kinerja yang kurang tersebut ditunjukkan lewat kegiatan yang monoton, menerima laporan dan kemudian mempublikasikannya. Hal itu sering terjadi pada komisioner yang berasal dari kandidat petahana,” jelas Nasir.

Meskipun begitu, Nasir tetap berharap Komisioner Komnas HAM bisa diisi orang-orang yang punya kompetensi di bidangnya. Ia juga berharap lembaga ini bisa diisi orang-orang baru, yang



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa

memahami advokasi hak asasi manusia serta punya rekam jejak yang bagus.

“Saya berharap catatan ini nantinya dibacakan dalam rapat paripurna mendatang,” imbuh politisi asal dapil Aceh itu.

Tujuh calon anggota Komisioner Komnas HAM periode 2017-2022 yang telah disepakati yakni Mohammad Choirul Anam (Advokat), Beka Ulung Hapsara (Pegiat LSM), Ahmad Taufan Damanik (Mantan Komisioner ACWC), Munafrizal Manan (Akademisi), Sandrayati Moniaga (Petahana Komnas HAM), Hairansyah (Akademisi), dan Amiruddin Al Rahab (Pegiat LSM).

Sebelumnya, komisioner terpilih itu harus melewati ujian administrasi dan publik. Dari kedua ujian tersebut, kemudian disaring menjadi 14 nama. Ke-14 nama itu yang melewati fit and proper test di Komisi III DPR RI. Setelah semua melewati ujian tersebut, Komisi III DPR RI memutuskan tujuh orang terpilih menjadi Komisioner Komnas HAM. ■

(si/mp) foto: andri/hr

# Permen LHK tentang Kebijakan Perhutanan Sosial Perlu Dikaji Ulang

Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah meminta agar Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor P.39 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani dikaji kembali, karena dianggap menimbulkan keresahan pada kalangan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

“Saya meminta agar Permen ini dikaji ulang lagi, karena KLH sepertinya mau memaksakan, apalagi mau memasukan kelompok masyarakat baru. Ini Harus dikaji ulang,” katanya, usai rapat dengar pendapat Komisi VI dengan Deputi bidang Agro dan Farmasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Wahyu Kucoro dan Dirut Perum Perhutani Denaldy Mulino Mauna, dengan agenda membahas terbitnya Permen LHK No. P.39 Tahun 2017, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (27/9).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, menjelaskan Indonesia mempunyai hutan yang sangat luas, yang sebagiannya masyarakat tinggal di wilayah itu. Hutan yang dalam pengelolaan Perum Perhutani ini kondisinya belum sinkron, antara pengelolaan Perhutanan bersama LMDH. Kemudian Muncul Kebijakan Kementerian LHK Pemen P.39 yang dianggap memunculkan keresahan LMDH.

“Karena P.39 ini memberikan wewenang Masyarakat Tani Hutan untuk mendapatkan lahan yang dapat mereka garap dan kelola, tapi tidak melibatkan LMDH, maka banyak masyarakat mengadu untuk perlu diklarifikasi,” ungkap Wakil Rakyat daerah pemilihan Jawa Tengah VIII ini.

Menurutnya, kehadiran BUMN salah satunya adalah untuk kesejahteraan

masyarakat. Kalau kehadiran Perhutani itu bisa memberikan nilai kesejahteraan dengan berbagi hasil untuk masyarakat desa hutan artinya Perhutani juga telah melakukan salah satu kerja, bakti nyata bahwa mereka meningkatkan kesejahteraan.

“Kalau ini betul-betul domainnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia khususnya yang ada atau tinggal pada area Perhutani di daerah-daerah hutan, maka mereka harus menjadi bagian dari penerima manfaat,” tegasnya.

Patut diketahui, Piloting implementasi perhutanan sosial, pemerintah telah menetapkan 2 lokasi piloting yang sudah siap di Pulau Jawa, yakni Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pemalang luas 1.022 Ha dengan jumlah penggarap 789 orang, dan KPH Probolinggo luas lahan 1.275,05 Ha dengan jumlah penggarap 686 orang.

Konsep Perhutanan Sosial ini diharapkan mampu mensejahterakan masyarakat sekitar hutan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Presiden RI Joko Widodo “Hutan harus mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Konsep perhutanan sosial akan memberikan aspek legal masyarakat menanam di hutan rakyat. Semangat perhutanan sosial



Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah

memunculkan keadilan sosial. Masyarakat hidup di perhutanan sembari melestarikan sumber daya hutan”.

Kondisi saat ini 25.863 desa di Indonesia berada di dalam kawasan hutan. 70% diantaranya menggantungkan hidup pada sumber daya hutan. 10,2 juta penduduk belum sejahtera di kawasan hutan karena tanpa aspek legal mengelola sumber daya hutan.

Solusinya, Pemerintah mengambil kebijakan dengan mengalokasikan 12,7 juta Ha untuk program perhutanan sosial, pemberian aspek legal izin pengelolaan hutan untuk penggarap lahan perhutanan sosial, serta sinergi kemitraan antara penggarap lahan dengan BUMN. ■

(as.mpr), Foto : agung s/nr

## Baleg DPR Tepis *Single Mux* Hadirkan Praktik Monopoli

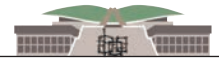
Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas menepis pandangan bahwa konsep *single mux* operator dalam draft RUU Penyiaran akan menciptakan praktik monopoli. Sebab, dalam konsep *single mux*, frekuensi sepenuhnya akan dikelola negara.

“*Single mux* justru bukan monopoli, sebaliknya justru memberi keadilan bagi masyarakat karena tiap penyelenggara (Lembaga Penyiaran Swasta/LPS) hanya akan diberikan satu

kanal, dan setiap kanal berisi 12 channel,” tuturnya di sela-sela Rapat Pleno Baleg dengan Komisi I di Gedung DPR RI, Senayan, Senin (02/10).

la menjelaskan, dalam rapat yang

berlangsung tertutup tersebut, perbedaan pandangan tentang tata cara perpindahan televisi analog ke digital sangat alot. Sementara hanya ada dua fraksi yang sudah menyampaikan sikapnya, yakni



Fraksi Gerindra dan Fraksi Golkar. Menurutnya, penguasaan frekuensi harus diberikan kepada negara (single mux operator), mengingat frekuensi adalah sumber yang alam terbatas.

“Kita tetap konsisten untuk *single mux*, sementara fraksi Golkar mengusulkan *hybrid*. Namun, *Hybrid* kan belum dikenal, jadi dibutuhkan sebuah rumusan yang tetap mengatur peran swasta juga bisa terlibat, terutama bagaimana negara memiliki kekuasaan atas frekuensi, sehingga negara tidak dirugikan,” jelas politisi Gerindra ini.

“Ada 10 frekuensi yang sudah dikuasai swasta, selebihnya itu 30 akan ditarik dan dikuasai oleh negara,” sambungnya.

Sementara, Fraksi Golkar mengusulkan sistem *hybrid mux* operator dalam sistem imigrasi televisi



Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas saat memberikan keterangan, di Jakarta.

analog ke digital. Dengan alasan pertimbangan demokrasi penyiaran dan mempertimbangkan kesiapan lembaga penyiaran di Indonesia, dalam hal ini Lembaga Penyiaran Publik Radio Televisi Republik Indonesia (LPP RTRI) sebagai bentuk satu-satunya penyelenggara penyiaran multiplexing digital. ■

(arn/sc) Foto: Ojje/andri

## Baleg Desak Revisi Undang-Undang Narkotika

Wakil ketua Badan Legislasi DPR RI Arief Wibowo menilai kondisi saat ini sangat mendesak untuk dilakukan Perubahan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

“Sebenarnya rencana revisi atau perubahan UU No.35 Tahun 2009 sempat beberapa kali diusulkan berbagai pihak, salah satunya oleh pemerintah atau BNN dan sempat masuk Prolegnas (program legislasi nasional). Namun belum terlaksana karena ketika itu memang terlihat belum cukup matang materinya. Malah kodifikasi dan harmonisasi banyaknya aturan-aturan, pelaksanaan undang-undang yang terkait,” ujar Arief saat memimpin Tim Kunjungan Spesifik Baleg dalam rangka pemantauan dan peninjauan UU No.35 Tahun 2009 di Mapolda Sulawesi Selatan, Rabu (4/10).

Namun melihat kondisi bangsa kita saat ini dimana menurut data BNN setiap tahunnya ada 250 ton narkotika masuk ke Indonesia. Bahkan sempat ditemukan juga pabrik pembuat narkoba di Indonesia. Sehingga dalam setiap harinya ada 50 generasi muda bangsa ini yang meninggal dunia karena narkotika. Oleh karena itu Arief menilai perlunya segera perubahan atas UU No.35 Tahun 2009 ini.

“Banyak hal-hal didalam undang-undang tersebut yang harus segera dilakukan perubahan misalnya definisi pengguna atau pemakai dan pengedar yang masih belum jelas. Jenis-jenis narkoba baru yang belum tercantum dalam undang-undang. Siapa yang harus

direhabilitasi dan apakah pihak yang sudah direhabilitasi statusnya sudah tersangka. Itu juga belum jelas. Dan masih banyak lagi ketidakjelasan yang ada dalam undang-undang tersebut,” jelas politisi fraksi PDI Perjuangan ini.

Hal tersebut juga diamini oleh anggota Tim Kunker Baleg lainnya yang ikut dalam kunjungan tersebut, seperti Marlinda Irwanti, Irmadi Lubis, Syaiful Bahri Anshori, Martri Agoeng, Ketut Sustiwani, Andi Rio Pandjalangi, Andi Yuliani Paris, Bahrum Daido dan Amirul Tamim.

Senada dengan Tim Kunker Baleg, Kapolda Sulsel, Mukhtiono mengapresiasi atas pemantauan dan peninjauan UU No.35 tahun 2009 yang dilakukan Baleg DPR RI dan sepakat untuk dilakukan perubahan terhadap undang-undang tersebut. Termasuk di dalamnya pemberatan hukuman yang bisa menimbulkan efek jera bagi pengguna serta individu lainnya.

la pun mengamini bahwa kondisi bangsa saat ini sudah masuk dalam darurat narkoba. Polda Sulsel pun sempat melakukan kegagalan dan penangkapan upaya pengedaran ratusan kilogram narkoba yang masuk ke wilayah hukumnya beberapa waktu lalu. Mukhtiono pun bertekad dan tidak akan pernah lelah untuk terus melakukan penangkapan peredaran obat-obatan terlarang dan sejenisnya tersebut. ■

(ay/usc),



Wakil Ketua Baleg DPR RI Arief Wibowo dan Anggota berfoto bersama dengan Kapolda Sulsel Mukhtiono usai pertemuan di Mapolda Sulawesi Selatan.

# Konsep Masalah Narkoba Harus Ditingkatkan Jadi Pertahanan Keamanan Negara

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunjungan Spesifik Baleg ke Provinsi Kepulauan Riau Firman Soebagyo mengusulkan, konsep permasalahan narkoba sudah harus ditingkatkan menjadi pertahanan keamanan negara, mengingat peredaran dan transaksionalnya sudah melewati lintas negara.

Hal itu diungkapkannya saat rapat dengar pendapat dengan Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Kapolda Kepri Sam Budi Gusdian, Kepala BNNP Kepri Nexson Manurung, dan Organisasi Lintas Masyarakat Provinsi Kepri. Rapat tersebut dalam rangka pemantauan dan peninjauan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Provinsi Kepulauan Riau di Gedung Aula Mapolda Kepri, Rabu (04/10).

“Pemantauan yang dilakukan Badan Legislasi DPR RI terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mencakup kegiatan pengawasan yang dilakukan secara seksama terhadap pelaksanaan UU untuk melihat efektifitas dan kesesuaian antara peraturan (Norma) dan kondisi pelaksanaannya, termasuk peraturan pelaksanaan dan limitasi pembentukannya. Sementara Peninjauan

yang dilakukan sebagai bentuk kegiatan terhadap UU yang telah disahkan di lingkungan *stakeholder* dan masyarakat,” papar Firman.

Mengingat, lanjut politisi Golkar ini, Revisi UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan RUU Usul Inisiatif Pemerintah, akan tetapi DPR RI dalam hal ini Baleg sedang terus mempersiapkan diri sembari menggali masukan terhadap RUU tersebut, meskipun Draft dan Naskah Akademiknya belum diserahkan oleh Pemerintah. RUU ini juga telah masuk di dalam RUU Prolegnas dan akan diusulkan menjadi RUU Prolegnas Prioritas.

Ia menjelaskan, Provinsi Kepulauan Riau menjadi provinsi yang dipilih Baleg untuk menyerap aspirasi dan masukan terkait RUU Narkotika dikarenakan letak geografis Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Singapura dan Malaysia,

dimana pintu masuk pelabuhan menjadi pintu masuk bagi peredaran gelap narkotika.

Yang menarik ungkap legislator dapil Jateng ini, adalah di Provinsi Kepulauan Riau terdapat 3 wilayah pintu masuk yang sangat rawan bagi peredaran narkoba, dimana kondisi ketiga pintu masuk tersebut minim sarana dan prasarannya, minim tenaga SDMnya, dan minim anggarannya, sehingga membuat tidak maksimal dan optimalnya pemberantasan narkoba di perbatasan Kepulauan Riau.

“Ada 3 wilayah pintu masuk yang sangat rawan, yaitu terutama Karimun, dan kemudian Bintan ternyata Batam itu termasuk urutan yang ketiga. Karena ternyata justru sumber daripada masuknya narkoba itu bukan dari Singapura tapi justru dari Malaysia Johor. Oleh karena itu, dengan adanya persoalan-persoalan yang ada di lapangan Kapolda Kepri tadi menyampaikan juga bahwa minimnya sapras, minimnya SDM, minimnya anggaran ini menjadi kendala utama. Baik itu di Kemenkumham maupun BNN juga Polda. Oleh karena itu kita akan mencoba memformulasikan terhadap masalah yang berkaitan dengan revisi UU ini,” terangnya.

Terkait usulan konsep Firman terhadap penanganan persoalan narkoba yang seharusnya ditingkatkan menjadi pertahanan terhadap keamanan negara, hal tersebut disambut baik Kapolda Kepri Sam Budi Gusdian, mengingat adanya transaksi narkoba dan peredarannya sudah mencapai lintas negara. Sehingga perlu ada aparat penegak hukum Polri di setiap perwakilan Indonesia di Luar Negeri guna mengantisipasi peredaran narkoba dari hulu ke hilir sehingga kepolisian dapat memantau secara optimal.

Menanggapi hal tersebut, Firman menyatakan setuju adanya kerjasama dalam mengantisipasi peredaran narkoba dari hulu ke hilir. “Kerjasama terhadap penindakan narkoba saya rasa tidak dilakukan hanya ketika sudah ada yang masuk baru berbuat, tapi dari sejak dini sudah dilakukan semacam operasi intelijen bersama. Saya rasa ini menarik sekali,” tutup Firman. ■



Tim Kunjungan Kerja Baleg saat tiba di Gedung Aula Mapolda Kepri, di Batam.

(ndy/sc), Foto:madya/fhr



Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf saat memimpin Delegasi sidang The Annual WTO Public Forum 2017 di Markas Besar WTO, Jenewa - Swiss.

## Tatanan Perdagangan Dunia Saat Ini Masih Jauh Dari Ideal

Selama ini perdagangan lintas negara dipercaya memegang peran penting untuk memajukan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keuntungan ekonomi dan pembangunan yang ditimbulkan dari perdagangan internasional yang terbagi secara adil merata sangat berperan dalam membantu pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Untuk menjamin pencapaian SDGs, sistem perdagangan internasional harus inklusif dan sejalan dengan prinsip *no one left behind* yang menjadi esensi tujuan pembangunan berkelanjutan. Inklusivitas harus dimaknai bahwa sistem perdagangan global tidak boleh menjadi zero-sum game dan mengabaikan hak sebagian kalangan untuk menikmati keuntungan perdagangan internasional, khususnya masyarakat yang hidup di negara sedang berkembang dan negara kurang maju.

Pandangan tersebut disampaikan Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf saat memimpin Delegasi DPR RI sidang *The Annual WTO Public Forum 2017* yang berlangsung pada tanggal 26-28 September 2017 di Markas Besar WTO, Jenewa – Swiss. Delegasi DPR RI pada sidang ini selain Nurhayati, hadir pula Andi Iwan Aras (F-Partai

Gerindra) dan Bara Krishna Hasibuan (F-PAN).

Tahun ini WTO Public Forum mengambil tema utama “Trade Behind the Headlines” yang dihadiri lebih dari 350 peserta dari seluruh dunia yang terdiri dari anggota parlemen, akademisi, pakar, organisasi masyarakat sipil dan organisasi-organisasi yang berkecimpung di bidang perdagangan.

“Kami menyayangkan realitas saat ini yang jauh dari ideal. Tidak dipungkiri perdagangan global masih dikuasai pihak-pihak yang memiliki posisi tawar dan keistimewaan dalam hal akses, dukungan finansial dan know-how. Ketidaksetaraan posisi menjadikan kompetisi antara negara maju dengan negara berkembang dan miskin tidak berimbang. Demikian pula jika dilihat dari kesiapan UMKM di negara-negara sedang berkembang dan miskin untuk ikut bersaing dalam global value-chain,” demikian disampaikan

Nurhayati sebagai Ketua Delegasi DPR RI di depan 135 negara anggota *Inter-Parliamentary Union (IPU)* yang menghadiri *Parliamentary Session within the framework of the WTO Public Forum 2017*.

“Anggota Parlemen merupakan perwakilan suara rakyat terutama kelompok masyarakat termarginalkan. Oleh karena itu keterlibatan para wakil rakyat dalam negosiasi perdagangan guna memastikan inklusivitas perjanjian-perjanjian yang disepakati. Parlemen adalah pengejawantahan suara rakyat, sangatlah penting memasukkan parlemen dari sejak awal negosiasi perjanjian perdagangan,” demikian pungkas Nurhayati dalam menyikapi tema *Making Trade Fair: the Contribution of Parliaments*.

*Parliamentary Session within the framework of the WTO Public Forum 2017* merupakan bagian dari *The Annual WTO Public Forum* yang merupakan sesi khusus bagi anggota parlemen. Sesi ini terselenggara sebagai hasil kolaborasi antara *Inter-Parliamentary Union (IPU)* dan Parlemen Eropa, dengan menghadirkan pembicara Joseph Hyacinthe Owona Kono (Anggota Parlemen Kongo), Helmut Scholz (Anggota Parlemen Eropa), Mukhisa Kituyi (Sekretaris Jenderal UNCTAD), Sergi Corbalan (Executive Director Fair Trade Advocacy Office Brussels) dan Malik Parvez (Menteri Perdagangan dan Tekstil Pakistan) dengan moderator Ram Etwareea (Jurnal Le Temps).

Delegasi DPR RI menyampaikan pula perkembangan terbaru mengenai kerja-kerja DPR terutama terkait RUU Persaingan Usaha yang memuat perlindungan terhadap usaha kecil menengah dari persaingan usaha dan sistem perdagangan yang tidak adil.

Delegasi DPR RI juga menyampaikan diperlukannya dukungan bagi diplomasi perdagangan internasional Pemerintah RI. Saat ini sebagai koordinator Group-33, Indonesia mendorong diselenggarakannya diskusi tentang bagaimana mengembangkan kepentingan negara berkembang dan negara miskin (Less Developed Countries -LDCs) pada instrument pembangunan dari Mekanisme Pengamanan Khusus (Special Safeguard Mechanism -SSM) dan Saham Perusahaan Umum (Public Stock-Holding -PSH) sebagaimana telah disepakati melalui Bali Package. ■

(sc). Foto : Dokumen BKSAP/ky



Wakil Ketua DPR RI, Paoli Zon dan Agus Hermanto menemui massa aksi 299 di depan Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.

## Fadli Zon Tolak Perppu Ormas dan Kebangkitan PKI

Wakil Ketua DPR Fadli Zon dengan tegas menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (ormas) dan Kebangkitan PKI. Hal itu dikatakannya saat menerima perwakilan Aksi Bela Islam 299 di Ruang Tamu Pimpinan di Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (29/09).

“Kami mengucapkan terimakasih atas dua isu yang bapak dan ibu sampaikan. Pertama tentang Perppu nomor 2 tahun 2017. Kedua mengenai komunis. Mengenai Perppu saya dari awal pertama terus menolak, Fraksi Gerindra juga menolak. Mengenai bangkitnya kembali komunis saya juga menolak karena tidak sesuai dengan UUD 45 dan TAP MPRS Nomor 25,” tegasnya.

Pimpinan DPR Korpolkam ini mengatakan, Perppu tersebut akan dibahas di Komisi II DPR RI dan akan di paripurnakan untuk dimintakan persetujuan pada pertengahan Oktober sebelum masa sidang berakhir. “Sejauh ini kita belum mengetahui siapa yang mendukung atau menolak Perppu ini. Masih ada satu bulan silahkan saudara menyampaikan aspirasi kami siap menerima,” ungkapnya.

Dalam pertemuan singkat itu, Pimpinan Komisi II DPR juga menyatakan siap menerima, mendengar seluruh aspirasi seluruh masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi baik yang pro maupun kontra.

“Perppu ini perlu dibahas karena bertentangan dengan prinsip hukum, maka dari itu kami menerima setiap aspirasi yang akan disampaikan, masih ada waktu satu bulan,” ungkap Wakil Ketua Komisi II DPR Muzammil Yusuf.

Adapun Resolusi Aksi Bela Islam 299 yang disampaikan ke DPR adalah, “Kami umat Islam dari berbagai lapisan menyampaikan dua permintaan kepada DPR dan pemerintahan Jokowi. yaitu mengenai Perppu nomor 2 tahun 2017 dan kebangkitan komunis yang meresahkan masyarakat dan kehidupan nasional,” tegasnya.

“Pemerintah harus bertindak tegas atas kebangkitan PKI, karena tidak sesuai dengan Tap MPRS nomor 25 yang sampai saat ini tetap berlaku menetapkan pembubaran PKI. Apalagi kita tahu PKI pernah berkhianat pada tahun 65. Kebangkitan PKI merupakan bahaya yang harus diwaspadai,” tandasnya. ■





Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dan Fahri Hamzah menghadiri Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kompleks Lubang Buaya, Jakarta, Minggu (1/10), Foto: Arief,Jaka/hr



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima Kepala Perwakilan Kedutaan Besar Republik Arab Suriah Ziad Zaheredin di Ruang Kerja, Kamis (05/10).Foto : Jayadi/hr.



Sekretariat Jenderal MPR/DPR/DPD RI, melaksanakan upacara memperingati hari Kesaktian Pancasila.Senin (02/10), di Jakarta.Foto : Jaka/hr.